

**ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Dosen Pembimbing : Novendi Arkham Muftadi, M.Akun



MAULIDA ISNAINI AFWA WAHID
NIM : 4318038

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Dosen Pembimbing : Novendi Arkham Muftadi, M.Akun



MAULIDA ISNAINI AFWA WAHID

NIM : 4318038

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Isnaini Afwa Wahid

NIM : 4318038

Judul Skripsi : **Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Maulida Isnaini Afwa Wahid

NOTA PEMBIMBING

Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun

Desa Ciberung Rt.2 Rw.3 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Maulida Isnaini Afwa Wahid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Maulida Isnaini Afwa Wahid**

NIM : **4318038**

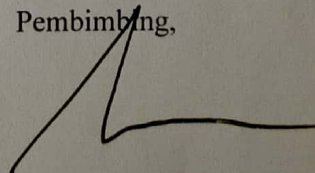
Judul Skripsi : **Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Maret 2022

Pembimbing,



Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun

NIP. 19891103 201908 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. 085728204134
Website: febi.iainpekalongan.ac.id/Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan mengesahkan skripsi
Saudari :

Nama : **Maulida Isnaini Afwa Wahid**
NIM : **4318038**
Judul : **Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi
Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai
Variabel Moderasi**

Telah diujikan pada hari rabu dan jumat tanggal 6 dan 8 April 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M
NIP. 198205272011011005

Penguji II

Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si
NIP. 198406122019032011

Pekalongan, 14 April 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H.

NIP. 19750220 1999032 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Abudul Wahid dan Ibu Warsinah yang telah mendukung baik secara materi maupun non materi selama kuliah di IAIN Pekalongan.
2. Kedua kakak saya Jamal Aziz Mizwar dan Solehudin Khamim serta Adik saya M. Ghozin Wahid dan Kuni Sa'adah Wahid beserta seluruh keluarga yang selalu menyemangati saya.
3. Almamater saya jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

4. Dosen Pembimbing Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik (DPA) M. Nasrullah, M.Si yang selalu memberikan saran dan bimbingan selama di IAIN Pekalongan.
6. Maliya Husni, Eni Fiana, Rismawati, Sintia Dewi, Risyanti Puji Astuti dan Khalimatus Sa'diyah selaku sahabat yang selama ini memberikan semangat dan bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang selama tahun ini berjuang bersama-sama.
8. Teman-teman HMJ Akuntansi Syariah, GenBI Tegal Komisariat IAIN Pekalongan dan Ruang Belajar Indonesia (RBI) yang telah memberikan kesempatan berkarir di dunia organisasi baik intra maupun ekstra kampus.
9. Teman-teman KKN TEMATIK 51 Kelompok 10 Desa Kayupuring yang telah berjuang bersama mengabdikan kepada masyarakat selama 45 hari.

MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan

Imam Syafi'i

Ilmu itu lebih baik daripada kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu

Ali bin Abi Thalib

ABSTRAK

MAULIDA ISNAINI AFWA WAHID. Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi

Kualitas laporan keuangan harus diberikan kepada pengguna laporan yang berisi informasi mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan fakta dan data yang telah terjadi serta dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan benar, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu memanfaatkan teknologi informasi yang ada maka dapat mencapai tujuan serta kepentingan bersama sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Selain itu untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia dan Pemanfaatan teknologi informasi dapat dimoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner) dengan menggunakan sampel sebanyak 65 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji regresi linier berganda dan Uji Moderated regression analysis dengan bantuan SPSS 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Selain itu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mampu dimoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Sedangkan Kompetensi sumber daya manusia dan Pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu dimoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

MAULIDA ISNAINI AFWA WAHID. Analysis of Determinants of Financial Report Quality in Regional Apparatus Organizations With Internal Control Systems as Moderating Variables

The quality of financial reports must be provided to users of reports that contain information about financial statements that are in accordance with facts and data that have occurred and by applying government accounting standards correctly, human resources who have competence and are able to utilize existing information technology can achieve their goals and common interests so as to produce quality output. The purpose of this study is to analyze the application of government accounting standards, competence of human resources and utilization of information technology can affect the quality of government financial reports. In addition, to analyze the application of government accounting standards, competence of human resources and use of information technology, the internal control system can be moderated on the quality of government financial reports.

This research is a type of quantitative research. The method of data collection in this study is a questionnaire method (questionnaire) using a sample of 65 respondents. The sampling technique was purposive sampling method. This study uses multiple linear regression test data analysis methods and moderated regression analysis test with the help of SPSS 23.

The results of the study indicate that the application of government accounting standards, competence of human resources and utilization of information technology affect the quality of government financial reports. In addition, the application of Government Accounting Standards can be moderated by the internal control system on the quality of the Government's financial reports. Meanwhile, the competence of human resources and the use of information technology cannot be moderated by the internal control system on the quality of government financial reports.

Keywords: Implementation of Government Accounting Standards, Competence of Human Resources, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, Quality of Financial Reports.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rector IAIN Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E, Ak, MSA, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
6. Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. M. Nasrullah, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M dan Alvita Tyas Dwi Arani, M.M selaku dosen penguji sidang skripsi.
9. Jajaran OPD kabupaten Batang yang telah mengisi kuesioner dalam memperoleh data yang saya perlukan;
10. Kedua orangtua saya Alm. Bapak Abudul Wahid dan Ibu Warsinah saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

11. Kedua kakak saya Jamal Aziz Mizwar dan Solehudin Khamim serta Adik saya M. Ghozin Wahid dan Kuni Sa'adah Wahid beserta seluruh keluarga yang selalu menyemangati saya beserta seluruh keluarga.
12. Sahabat saya Maliya Husni, Eni Fiana, Rismawati, Sintia Dewi, Risyanti Puji Astuti, Khalimatus Sa'diyah yang selama ini memberikan semangat dan bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang selama tahun ini berjuang bersama-sama.
14. Teman-teman HMJ Akuntansi Syariah, GenBI Tegal Komisariat IAIN Pekalongan dan Ruang Belajar Indonesia (RBI) yang telah memberikan kesempatan berkarir di dunia organisasi baik intra maupun ekstra kampus.
15. Teman-teman KKN TEMATIK 51 Kelompok 10 Desa Kayupuring yang telah berjuang bersama mengabdikan kepada masyarakat selama 45 hari.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 14 Maret 2022



Maulida Isnaini Afwa Wahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat penelitian.....	17
E. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Stewardship.....	20
B. Kualitas Laporan Keuangan	22
C. Standar Akuntansi Pemerintah	26
D. Kompetensi Sumber Daya Manusia	27
E. Pemanfatan Teknologi Informasi	28
F. Sistem Pengendalian Internal	29
G. Telaah Pustaka.....	30
H. Model Penelitian.....	39
I. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Data	47

B. Teknik Pengambilan Sampel.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel	50
E. Teknik Analisis Data	52
1. Analisis Deskriptif.....	52
2. Uji Kualitas Data	52
3. Uji Asumsi Klasik.....	53
4. Uji Hipotesis	54
5. Analisis regresi moderat (Moderated Regression Analysis)	55
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil.....	57
1. Karakteristik Responden	57
2. Analisis Deskripsi	61
3. Uji Kualitas Data	69
4. Uji Asumsi Klasik.....	72
5. Uji Hipotesis	75
6. Analisis Regresi Moderat atau <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	77
B. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan Penelitian.....	96
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	96
D. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika suatu instansi pemerintah mendapat opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Namun dalam laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Kurniawan, 2016).

Perolehan opini wajar tanpa pengecualian tidak bisa menjadi tujuan akhir pada penyusunan laporan keuangan. Dengan hal tersebut, pemerintah harusnya melakukan evaluasi kembali terhadap hal-hal apa saja yang bisa dimaksimalkan terutama dalam hal efisiensi anggaran (Widiastuti, 2020). Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Subaweh, 2008).

Pemerintah dituntut masyarakat agar menyelenggarakan aktivitas dalam pemerintahan dengan baik supaya menghasilkan akuntabilitas publik yang tepat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dari aktivitas yang telah dilaksanakan untuk masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Ningrum, 2019). Fenomena yang menarik untuk dikaji yaitu pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Karena masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan, dan masih banyak penyimpangan serta permasalahan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan daerah yang membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance Government) meningkat (Ramadhani, 2019).

Memberikan opini kepada suatu instansi merupakan salah satu bentuk apresiasi Badan pemeriksa keuangan atas hasil kajian laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan keuangan tidak akuntabel ketika anggaran banyak yang salah dipergunakan. Dalam instansi pemerintah perencanaan laporan keuangan menjadi wujud akuntabilitas terdapat kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintah karena banyak kekurangan dalam sistem pengendalian internal dan terbatasnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi, kurang pahamiannya pegawai akan cara memanfaatkan teknologi informasi dan

menghindarkan kesalahan pada sistem pengendalian internal yang lemah. (www.bpkd.go.id diakses pada 4 Agustus 2021, 10.48 wib).

Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian hampir Rp. 8,28 Triliun pada pemerintah daerah yang terdiri dari: sebanyak 2.693 (66%) permasalahan mencapai Rp. 1,79 Triliun, Potensi kerugian 433 (11%) permasalahan sebesar Rp. 3,30 Triliun, dan penerimaan yang kurang 925 (23%) permasalahan sebanyak Rp. 3,19 Triliun. Dengan banyaknya penyelewengan serta permasalahan tersebut akan berdampak buruk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kurang berkualitas. Dengan adanya opini laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun dari 2015-2019 yang gambarkan sebagai berikut

Tabel 1. 1
Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2015-2019

Tahun	Kabupaten								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TMP	%	TW	%	
2015	313	58%	194	36%	31	5%	4	1%	542
2016	378	70%	141	26%	23	4%	0	0	542
2017	411	76%	113	21%	18	3%	0	0	542
2018	443	82%	86	16%	13	2%	0	0	542
2019	485	90%	50	9%	6	1%	0	0	541

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020

Opini wajar tanpa pengecualian secara beturut-turut sebanyak keempat telah diraih Pemerintah Kabupaten Batang dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah. Berdasarkan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Pengelolaan keuangan Kabupaten

Batang sudah memenuhi unsur kesesuaian, kepatuhan dan efektivitas. Namun dalam tata pengelolaan keuangan ada beberapa catatan yang perlu untuk diperbaiki, di antaranya pengelolaan investasi jangka panjang agar sesuai dengan target yang hendak dicapai, kebijakan akuntansi yang meliputi jalannya lingkungan, pekerjaan yang kurang sesuai dengan kontrak serta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (www.ayosemarang.com diakses 4 Agustus 2021, 10.34 wib).

Berdasarkan Laporan keuangan kabupaten batang yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum mampu memenuhi target yang hendak dicapai, sehingga realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan anggaran yang ada. Maka dapat dijelaskan dari laporan realisasi APBD Kabupaten Batang yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Batang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.502.475.483.000,00	Rp. 1.475.665.027.181,00
2	Jumlah Belanja	Rp. 145.334.580.179,00	Rp. 118.578.238.054,00
3	Jumlah Transfer	Rp. 313.445.003.000,00	Rp. 312.939.446.703,00
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 94.594.861.816,00	Rp. 94.594.861.816,00
5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 9.000.000.000,00	Rp. 7.183.949.725,00

Sumber: www.batangkab.go.id

Dampak dari pandemi covid sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang tidak sesuai dengan target awal. Semulanya pajak restoran dengan target awal Rp.3.733 Miliar, namun tahun 2020 realisasi hanya Rp. 2.066 Miliar. Begitu pula dengan pajak hiburan yang mempunyai target Rp. 1.049 Miliar, namun realisasi hanya sebesar Rp. 309 Miliar. Sedangkan pajak reklame memiliki target Rp. 1.351 Miliar, namun realisasi hanya sebesar Rp.961 Juta. Dengan demikian sangat memungkinkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang masih terdapat beberapa masalah atas kurang sesuainya target yang hendak dicapai dengan realisasinya (www.ayosemarang.com diakses 23 Agustus 2021, 8.36 wib).

Dengan adanya beberapa hal yang harus diperbaiki oleh kabupaten Batang, maka dari laporan operasional Kabupaten Batang menjelaskan bahwa penerimaan pendapatan pemerintah daerah di 2020 mengalami penurunan dan lebih rendah dari penerimaan di 2019. Selain itu beban yang harus dikeluarkan lebih banyak dan besar di 2020 yang menjadikan tidak imbang antara penerimaan dengan pengeluaran, maka hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Laporan Operasional Kabupaten Batang

Uraian	2020	2019
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 99.2.291.819,97	Rp. 105.688.264.475,88
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp. 1.006.742.175.1330,5 0	Rp. 1.090.560.256.917,73
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp. 86.872.377.000	Rp. 24.5560.987.000
Jumlah Pendapatan Transfer Pendapatan Provinsi	Rp. 116.058.349.492	Rp. 133.965.017.845
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp. 1.209.672.901.622,50	Rp. 1.249.086.261.762,73
Jumlah Lian-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 80.659.895.398	Rp. 82.953.434.923
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.293.197.254.474,26	Rp. 1.335.660.871.334,89
JUMLAH BEBAN	Rp. 238.307.516.790,04	Rp. 231.531.631.126,49
SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp. 1.054.889.737.684,2 2	Rp. 1.104.129.240.208,40

Sumber: www.batangkab.go.id

Pemerintah kabupaten Batang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, akan tetapi permasalahan aset di Kabupaten Batang masih belum bisa dituntaskan. Inventaris aset gabungan kabupaten batang menggunakan anggaran yang cukup banyak hingga mencapai Rp. 23.596.057.534,32. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang dituntut untuk memperbaiki laporan keuangan dan aset yang dimiliki pada

setiap Organisasi Perangkat Daerah agar lebih berkualitas (www.batangkab.go.id).

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih banyak penyimpangan, masalah dan data yang tidak sesuai dalam melaksanakan audit dengan mengungkapkan sebanyak 5.175 permasalahan utama sistem pengendalian internal yang terjadi pada pemerintahan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Permasalahan Utama Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintahan Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.729
2	Kelemahan pada Sistem Pengendalian Pelaksanaan Pendapatan Belanja	2.338
3	Kelemahan pada Struktur Pengendalian Internal	1.108

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020

Pemerintah dituntut memberikan kinerja yang baik dan menyampaikan informasi atas aktivitas yang dilakukan sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Tanggungjawab pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat menjadi upaya konkrit guna menghasilkan informasi yang transparansi dan akuntabilitas (Hartono & Ramdany, 2020). Laporan keuangan pemerintah harus menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya, yaitu laporan harus memiliki kualitas yang dapat mendukung dalam menilai akuntabilitas, dapat dipahami dengan mudah oleh para penggunannya termasuk masyarakat dan

dapat membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Ningrum, 2019).

Informasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan pemerintah sangat berguna bagi banyak pihak untuk kepentingan masing-masing. Pengguna laporan keuangan menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: lembaga pemeriksa, wakil rakyat, lembaga pengawas, masyarakat, investasi dan pinjaman, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, serta pemerintah. Informasi akuntansi yang mampu mencapai tujuannya dengan ukuran normatif merupakan karakteristik dari kualitatif laporan keuangan (Indriani, 2016).

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu susunan laporan keuangan terdiri dari laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan (PP, 2010).

Standar akuntansi pemerintah digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah karena dijadikan sebagai pedoman yang memuat berbagai informasi dan sistem keuangan yang memadai (Angelicca, 2019). Dengan menerapkan Standar akuntansi

pemerintah secara baik dan tepat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan tersebut (Apriansyah, 2020). Karakteristik laporan keuangan yang terdiri dari: 1) relevan untuk mengambil keputusan, 2) andal yang disusun berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan, 3) dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan 4) dapat dipahami secara mudah (Pujanira, 2017).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Badan Pemeriksa keuangan menyatakan bahwa kabupaten batang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga laporan keuangan kabupaten batang sudah sesuai dengan pedoman standar akuntansi yang menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas unggul.

Berdasarkan Penelitian Farikhoh (2019), Angelicca (2019) dan Pujanira (2017) menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian inapty (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Namun kenyataannya dalam pemerintah daerah masih banyak

ketidaksesuaian pemilihan dalam penggunaan sumber daya manusia (Hardyansyah, 2016). Dalam menyelenggarakan *good governance* yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, maka kualitas sumber daya manusia yang minim harus dipertimbangkan untuk memenuhi kompetensi akuntansi (Triyanti, 2017).

Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi mempunyai pengalaman serta mengikuti pelatihan di bidang keuangan akan menjadikan sumber daya manusia berkompeten, sehingga lebih mudah dalam memahami logika akuntansi dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan secara efektif dan efisien. Pendidikan dengan tingkat yang lebih tinggi akan memudahkan masyarakat dalam menyerap informasi dan mengimplementasikannya pada gaya hidup sehari-hari dan perilakunya (Kurniawan & Yuniarto, 2016).

Permasalahan umum pada instansi pemerintah adalah penataan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kualitas (cakap) maupun kuantitas dan tidak mengikuti prinsip *the right man on the right place* yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi, sedangkan pengembangan instansi hanya mempertimbangkan kewenangan (Aruan, 2003).

Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat daerah. Hasil pemeriksaan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan bahwa kabupaten batang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tidak lepas dari sumber daya manusia dengan memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang berkompeten dalam menyajikan dan mengelola laporan keuangan yang berkualitas unggul.

Penelitian Elfauzi (2019), Apriyansyah (2020) dan Hartono (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian inapty (2016) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Apabila tidak adanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan akan memperlambat ketepatanwaktuan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya teknologi informasi dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga memberikan manfaat serta kemudahan. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan baik, akan tetapi masih banyak pegawai yang belum memahami perkembangan teknologi informasi. Teknologi menjadi alat untuk menyelesaikan tugas-tugas dan merapikan pengelolaan keuangan pemerintah yang digunakan oleh individu. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas harus memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan (Ramadhani, 2019).

Manfaat teknologi informasi sangat berguna bagi keberlangsungan pemerintah yaitu penyimpanan data dalam jumlah besar, kecepatan dalam pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, kemampuan *multiprocessing*, keakuratan perhitungan dan pos-pos pemrosesan yang lebih rendah. Namun implementasi teknologi informasi sangat mahal dan banyak kendala yang berkaitan dengan kondisi perangkat lunak dan keras, keterbatasan dana, ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi oleh sumber daya manusia secara maksimal dan pemutakhiran data. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum berjalan secara optimal dalam instansi pemerintah (Nurillah & Muid, 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal terhadap penyusunan dan pengelolaan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat daerah. Berdasarkan laporan keuangan kabupaten batang pada *website* www.batangkab.go.id sudah di publikasikan tepat waktu dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan peraturan menjadikan teknologi informasi sudah dimanfaatkan secara maksimal dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas unggul.

Penelitian Apriyansyah (2020), Ramadhani (2018) dan Ningrum (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Gasperz (2019) menunjukkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kewajiban dan wewenang organisasi selalu memberikan keyakinan kepada publik bahwa semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan telah sesuai dengan tata pemerintahan yang baik dan berdasarkan undang-undang secara efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat tingkat korupsi yang terjadi masih tinggi dan kebocoran anggaran masih banyak terjadi. Sistem pengendalian internal diperlukan sebagai alat pengendali untuk para penerima anggaran untuk memperoleh bukti transaksi agar tidak diragukan kebenarannya sebagai wujud pertanggungjawaban atas realisasi anggaran sebagai akuntabilitas suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bermakna proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui pengamanan aset negara, kegiatan yang efektif dan efisien, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan pelaporan keuangan (PP, 2008). Penyebab adanya resiko dan kesalahan terhadap manajemen keuangan organisasi berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi (Gasperz, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaannya selalu menguji “kekuatan” dari sistem pengendalian internal untuk menentukan kelemahan yang terjadi dan diterapkan pada instansi pemerintahan dapat dikritisi oleh beberapa lembaga pemantau lainnya, sehingga penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah tidak dapat dihindari (Ramadhani, 2019).

Suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan dukungan sistem pengendalian internal yang kuat akan meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Laporan keuangan yang berkualitas unggul akan dihasilkan dengan menerapkan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dibantu sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu mengoptimalkan teknologi informasi dan diperkuat sistem pengendalian internal yang memadai.

Penelitian ini sejalan dengan Farikhoh (2019), Hardyansyah (2016) dan Achmad (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah mampu memperkuat hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Fikri (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memperkuat hubungan

pemerintah daerah mampu memperkuat hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat 3 Variabel independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu juga terdapat variabel moderasi yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penelitian ini lebih menekankan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan judul penelitian ini yaitu **Analisis Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

5. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

6. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Untuk menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Untuk menganalisis Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

5. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

6. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap penelitian di bidang akuntansi yang dapat memperkuat penelitian sebelumnya berkaitan dengan kualitas laporan keuangan serta dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan sehubungan dengan kualitas laporan keuangan, dapat digunakan dalam mengatasi masalah di masa depan dan mampu memberikan solusi dengan melatih kemampuan dalam perikir kritis.

- b. Bagi Pemerintah diharapkan dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah yang berlaku, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk pegawai bidang keuangan instansi pemerintah daerah sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan yang telah diuraikan, untuk memperoleh hasil dari penelitian tugas akhir yang disusun secara sistematis, maka penulis akan melakukan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian dari teori stewardship, kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal dan penelitian terdahulu serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menerangkan bagian mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang memaparkan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan keterbatasan penelitian serta implikasi teoritis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berarti jika Penerapan standar akuntansi pemerintah meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan oganisasinya.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti, jika kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang tidak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan oganisasinya.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti, jika

pemanfaatan teknologi meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Demi mencapai kandungan kualitas primer dari laporan keuangan pemerintah maka diperlukan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membuat pekerjaan pegawai lebih akurat dan cepat.

4. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi dan memperkuat hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten Batang telah mempunyai menerapkan standar akuntansi pemerintah secara baik dan berkala.
5. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi dan memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan Sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan mampu melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan bidang dan penempatannya yang didukung sistem pengendalian internal pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
6. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi dan memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini karena dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada guna meningkatkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan sistem pengendalian internal sebagai variable moderasi mampu memperkuat hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu terdapat variabel independen lain seperti pengalaman kerja, pemahaman basis akrual, peran internal audit, komitmen organisasi dll yang bisa dijadikan variabel pendukung untuk kebaruan penelitian selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batang menjadi lebih baik.
2. Keterbatasan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data menghambat peneliti untuk melakukan uji tes pilot kuesioner guna meyakinkan bahwa item-item pertanyaan dapat dimengerti oleh responden.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan hasil lapangan yang menunjukkan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penerapan standar akuntansi pemerintah mampu dimoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi mampu dimoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan tetapi tetap dibutuhkan evaluasi dan pengembangan serta pengawasan terhadap para pegawai dan teknologi yang digunakan agar lebih optimal lagi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan dapat diusulkan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Batang dianjurkan mampu mempublikasikan informasi kepada publik dan menampung aspirasi publik yang perlu dilakukan oleh staf ahli agar berjalan cepat dan tanggap serta untuk memanfaatkan dan mengelola situs website sebagai sistem informasi yang dapat menjadi sarana yang efektif.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dianjurkan dapat melibatkan masyarakat untuk dijadikan responden karena masyarakat menjadi pihak yang memiliki kebutuhan akan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner, Sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambah menggunakan metode observasi dan wawancara langsung antara responden dan peneliti agar tersampaikan secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., Darma, D. C., Maria, S., & Lestari, D. (2020). *Underground Economy: Teori Dan Catatan Kelam*.
- Angelicca, M. (2019). Keuangan Daerah Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Aruan, N. (2003). *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris Di Jawa Timur*.
- Astuti, A. R. T. (2019). *Manajemen Organisasi (Teori Dan Kasus)*. Iain Parepare Nusantara Press.
- Fitria, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*.
- Gasperz, J. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan*, 5(2), 40–46.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 Edisi 9 (Ke-9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar). *Skripsi*.
- Harry Apriansyah, S. R. Dan M. E. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Kompetensi Sumber Daya. *Jambi Accounting Review*,

I(April), 44–62.

Hartono, & Ramdany. (2020). *Pengaruh Sap, Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 9(1), 14–23.

Indriani, W. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. *Skripsi Universitas Bengkulu*.

Kamayanti, A. (2019). *Akuntansi Keperilakuan Telaah Artikel, Role Play, Latihan Dan Desain Riset*. Yayasan Rumah Panele.

Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). *Analisis Regresi: Dasar Penerapannya*.

Mahmudi. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn.

Mahardini, N. Y. (2018). Dampak penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia ada kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi banten tahun anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi Vol 5 No 1*, 22-32.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Psak*. Salemba Empat.

Mehta, C. R., & Patel, N. R. (N.D.). *Ibm Spss Exact Tests*.

Ningrum, W. M. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

- Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Di Kota Dan Kabupaten Magelang). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Sistem Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*. 3, 1–13.
- Pp. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Pp. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pp. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*.
- Pujanira, P. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. Skripsi*.
- Ramadhani, M. (2019). *Pengaruh Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten)*. 12(1).
- Rahmawati, D. (2018). *pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kota tangerang selatan. Jurnal ekonomi,bisnis dan akuntansi*, 20.
- Solimun. (2019). *Metode Statistika Multivariategeneralized Structured Component Abalysis (Gsca) Pemodelan Persamaan Structural (Sem)*. Ub Press.

Sudarmanto. (2014). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (Ed.); Edisi 2 Ce). Alfabeta.

Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Sinar Grafika Offset.

Triyanti. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang) Skripsi*.

www.batangkab.go.id

www.bpkd.go.id

www.ayosemarang.com